

# ANALISIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

# ANALISIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT 2018



# ANALISIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

Katalog : 3201028.32  
Nomor Publikasi : 32560.1924  
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm  
Jumlah Halaman : x+ 44 Halaman  
Naskah : Bidang IPDS  
Penyunting : Bidang IPDS  
Gambaran Kulit : Bidang IPDS

Diterbitkan oleh :

©BPS Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh :

BPS Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# ANALISIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT 2018

Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Dody Herlando, M. Econ

Koordinator Teknis : Jaih Ibrohim, S.Si

Naskah : Nano Suharno, MA

Pengolah Data : Nano Suharno, MA

Adhitya Dwi Kristanto, S.ST

Penyunting : Dewi Mulyahati, S.Si, ME

Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat

<https://jabar.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan serta factor-faktor yang terkait.

Publikasi ini menjelaskan metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dan analisis tentang penduduk/rumah tangga miskin. Analisis yang dilakukan meliputi perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2018.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada mereka yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Bandung, Desember 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Barat,



Ir. Dody Herlando, M.Econ



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	1
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II. KAJIAN LITERATUR .....	3
2.1. Definisi Kemiskinan .....	3
2.1.1. Kemiskinan Relatif.....	3
2.1.2. Kemiskinan Absolut.....	4
2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya .....	5
2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran... ..	6
2.2.1. Rata-rata Perkapita.....	11
2.3. Pendekatan BKKBN.....	13
2.4. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS.....	14
2.5. Sensus Kemiskinan.....	15
2.5.1. Sensus Kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan, 1999.....	15
2.5.2. Sensus Kemiskinan di provinsi DKI Jakarta, 2000.....	16
2.5.3. Sensus Kemiskinan di provinsi Jawa Timur, 2001.....	16
2.6. Peta Penduduk Miskin Indonesia, 2000.....	17
2.7. Pemetaan Kemiskinan Kecamatan di Indonesia, 2005.....	18
2.8. Pendekatan Spesifik-Daerah dan Sayang Budaya di Sumba Timur....	20
2.9. Pendataan Sosial Ekonomi, 2005 (PSE05).....	20
BAB III. METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN, DISTRIBUSI KETIMPANGAN PENGELUARAN .....	23
3.1. Metode Penghitungan Kemiskinan.....	23
a. Konsep.....	23
b. Sumber Data... ..	23
c. Metode.....	23
d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan.....	24
3.2. Indikator Kemiskinan.....	26
3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan/Pengeluaran .....	27
-Koefisien Gini (Gini Rasio).....	27

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	31
4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat, 2016-2018.....	31
4.2. Perkembangan Kemiskinan di Jawa Barat Maret 2016- Maret 2018.....	32
4.3. Garis Kemiskinan di Jawa Barat, Maret 2016-Maret 2018.....	34
4.4. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Jawa Barat, Maret 2016-Maret 2018 .....	36
4.5. Kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2018.....	37
4.6. Distribusi Ketimpangan Berdasarkan Koefisien Gini.....	39
 BAB V. PENUTUP.....	 41
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	43

<https://jabar.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Komponen Pengeluaran Konsumsi Penduduk Menurut Daerah di Indonesia Tahun 1976	8
Tabel 2.2	Perkiraan Pengeluaran Perkapita Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Menurut Komponen di Indonesia, 1970-1980 (Rp/Kapita/Bulan)	10
Tabel 2.3	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan	11
	Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan (Lanjutan)	12
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia Menurut Daerah, Kondisi Maret 2016 dan Maret 2018	31
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Menurut Daerah, Kondisi Maret Tahun 2016 dan 2018	32
Tabel 4.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah, Maret 2016 dan Maret 2018	33
Tabel 4.4	Garis Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia Tahun 2016 dan 2018	35
Tabel 4.5	Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa, Tahun 2013-2018	36
Tabel 4.6	Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah, Maret 2016 dan Maret 2018	37
Tabel 4.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, P1 dan P2, Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	38
Tabel 4.8	Gini Rasio Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia, 2013-2018	39

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz	28

<https://jabar.bps.go.id>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini dapat terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan analisis ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Barat dan Nasional tahun 2018 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
- b. Mengetahui ketimpangan pengeluaran Jawa Barat dan Nasional tahun 2018.

### **1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan**

Ruang lingkup dari analisis ini mencakup tingkat kemiskinan secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2018. Karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin juga disajikan pada tingkat nasional dan dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Analisis ini juga menyajikan ketimpangan pengeluaran penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sumber data yang digunakan dalam laporan ini adalah data Susenas Maret 2018.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

- Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.
- Bab III menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran ketimpangan pengeluaran.
- Bab IV membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Barat dan nasional.
- Bab V menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya Jawa Barat dan nasional.

## **BAB II KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Definisi Kemiskinan**

#### **2.1.1. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita".

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan pengecualian Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan.

Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif

tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

### **2.1.2. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut "tetap (tidak berubah)". Dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu :

- a) US \$ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut;
- b) US \$ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

### **2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya**

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan". Keberdayaan itu

sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Seringkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu "sudah takdir", dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya "Gerakan Membudayakan Keberdayaan" pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

## **2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran**

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul "Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia". Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut United Nations (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Komponen Pengeluaran Konsumsi Penduduk Menurut Daerah  
di Indonesia 1976

Jenis Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan
<b>A. PANGAN</b>		
1. Padi-padian dan hasil-hasilnya	√	√
2. Umbi-umbian dan hasil-hasilnya	√	-
3. Ikan dan hasil-hasil ikan lainnya	√	√
4. Daging	√	√
5. Telur, susu, dan hasil-hasil dari susu	-	-
6. Sayur-sayuran	√	√
7. Kacang-kacangan	-	√
8. Buah-buahan	√	√
9. Konsumsi lainnya	(√)	(√)
10. Makanan yang sudah jadi	-	-
11. Minuman yang mengandung alkohol	-	-
12. Tembakau, sirih	-	-
<b>B. BUKAN PANGAN</b>		
1. Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air	√	√
2. Barang-barang dan jasa-jasa	(√)	(√)
3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	√	√
4. Barang-barang yang tahan lama	√	√
5. Keperluan pesta dan upacara	√	√

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006

**Catatan:**

Tanda cek √ memperlihatkan dipergunakan sepenuhnya dan tanda (√) dipergunakan sebagian dari pengeluaran rata-rata jenis pengeluaran dalam kategori kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.

**Keterangan:**

- a. Dari seluruh pengeluaran untuk konsumsi lainnya ini diperkirakan 50 persen dan 75 persen dipergunakan untuk kebutuhan dasar bagi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan dan perdesaan. Dalam kategori kebutuhan dasar ini termasuk garam, lada, gula pasir, minyak goreng, dan lain-lain.
- b. Dalam kategori pengeluaran untuk barang-barang dan jasa-jasa ini termasuk pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan komposisi pengeluaran konsumsi penduduk di atas dapat dihitung besarnya kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut seperti disajikan pada Tabel 2.2. Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Tabel 2.2  
Perkiraan Pengeluaran Perkapita Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar  
Menurut Komponen di Indonesia, 1970-1980 (Rp/Kapita/Bulan)

Jenis Pengeluaran	1970		1980	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
A. PANGAN	864	823	4.477	4.300
1. Padi-padian dan hasil-hasilnya	(456)	(425)	(1.922)	(2.014)
2. Umbi-umbian dan hasilhasilnya	-	(38)	-	(155)
3. Ikan dan hasilhasil ikan lainnya	(116)	(90)	(632)	(503)
4. Daging	(78)	(43)	(505)	(216)
5. Sayur-sayuran	(74)	(57)	(558)	(413)
6. Kacangkacangan	-	(28)	-	(195)
7. Buah-buahan	(38)	(22)	(377)	(223)
8. Konsumsi lainnya	(102)	(120)	(483)	(581)
B. BUKAN PANGAN	376	176	3.293	1.182
1. Perumahan	205	98	2.124	691
2. Sandang	111	66	652	363
3. Pendidikan	40	8	337	78
4. Kesehatan	20	4	180	50
Jumlah Rata-rata Kebutuhan Dasar	1.240	999	7.770	5.482
Pengeluaran Rata-Rata	1.819	1.272	12.208	7.212

Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006

### 2.2.1. Rata-rata per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bahkan ada juga pengukuran secara internasional dengan menggunakan nilai uang dalam bentuk dolar. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari.

Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).

Tabel 2.3  
Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan Menurut Penelitian Beberapa Ahli

No.	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Kota (K)	Desa (D)	K+D
1.	Esmara, 1969/1970 *)	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 *)	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	480 360 270	320 240 180	- - -
3.	Ginneken, 1969 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 50

Tabel 2.3  
Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan (Lanjutan)

No.	Penelitian	Kriteria	Garis Kemiskinan		
			Kota (K)	Desa (D)	K+D
4.	Anne Booth, 1969/1970 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 40
5.	Gupta, 1973 *)	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp)	-	-	24.000
6.	Hasan, 1975 *)	Pendapatan minimum per kapita per ahun (US \$)	125	95	-
7.	BPS, 1984	1. Konsumsi kalori per kapita per hari  2. Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	- 13.731	- 7.746	2.100 -
8.	Sayogya, 1984 **)	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	8.240	6.585	-
9.	Bank Dunia, 1984 **)	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6.719	4.479	-
10.	Garis kemiskinan internasional, Interim Report, 1976 **)	Pendapatan per kapita per tahun : - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas daya beli	- -	- -	75 200
11.	Garis kemiskinan internasional, Ahluwalia, 1975 ***)	Tingkat pendapatan per kapita per tahun (US \$)			50 75

Sumber:

\*) Hendra Esmara : Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia,

Jakarta: 1986, hlm. 312-316, Tabel 9.2.

\*\*\*) Kompas, Senin : 9 Mei 1988.

\*\*\*) Montek S. Ahluwalia, *Income Inequality : Some Dimensions of The Problem*, dalam Hollis Chenery : *Redistribution with Growth*, London : University Press, 1974 hlm. 6-10; seperti dikutip oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam *Prisma* no. 2 tahun IV (April 1975), hlm. 24.

### **2.3. Pendekatan BKKBN**

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas.

Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

## 2.4. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS

Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan 16 Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita :
  - $\leq 8$  m<sup>2</sup> (skor 1)
  - $> 8$  m<sup>2</sup> (skor 0)
2. Jenis Lantai :
  - Tanah (skor 1)
  - Bukan Tanah (skor 0)
3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :
  - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
  - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC :
  - Tidak Ada (skor 1)
  - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset :
  - Tidak Punya Asset (skor 1)
  - Punya Asset (skor 0)

6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) :

- $\leq 350.000$  (skor 1)
- $> 350.000$  (skor 0)

7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :

- 80 persen + (skor 1)
- $< 80$  persen (skor 0)

8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :

- Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
- Ada, bervariasi (skor 0)

Ke delapan variabel di atas diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji Chi-Square juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

## **2.5. Sensus Kemiskinan**

Penghitungan kemiskinan dengan mengaplikasikan dan memodifikasi pendekatan kriteria penduduk miskin BPS telah dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan (1999), DKI Jakarta (2000), dan Jawa Timur (2001). Aplikasi penghitungan kemiskinan berdasarkan variabel-variabel kemiskinan rumah tangga tersebut dikenal sebagai Sensus Kemiskinan.

### **2.5.1. Sensus Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, 1999**

Penentuan suatu rumah tangga layak dapat Sembako didasarkan pada hasil skoring dari beberapa variabel yang diolah dari data hasil Pendataan Rumah tangga tahun 1999. Secara garis besar variabel yang dimaksud adalah :

1. Kelompok pendapatan perkapita.
2. Pola makanan.
3. Pakaian.

4. Perumahan : (luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan kakus).

5. Fasilitas TV.

Penentuan nilai skor untuk masing-masing variabel dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, dalam menentukan skor juga dilakukan beberapa kali uji coba (*trial and error*), sampai diperoleh nilai yang dianggap memadai. Dengan demikian, hasil dari skoring tersebut yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu rumah tangga layak atau tidak layak dapat sembako.

### **2.5.2. Sensus Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, 2000**

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin apabila memiliki minimal 3 ciri/variabel dari 7 variabel kemiskinan rumah tangga, yaitu:

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 m<sup>2</sup> per anggota rumah tangga.
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya.
3. Fasilitas air bersih : tidak ada.
4. Fasilitas jamban/WC : tidak ada dan atau WC Umum.
5. Kepemilikan aset (kursi tamu) : tidak tersedia.
6. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu : tak bervariasi.
7. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga : tidak ada.

### **2.5.3. Sensus Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, 2001**

Metodologi yang digunakan dalam penentuan skor untuk mengukur Indeks Rumah tangga Miskin (IRM) yaitu metode skor tertimbang (*weighted scoring method*) pada setiap kategorinya. Dengan menggunakan 11 variabel, dimana dalam setiap variabelnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu skor 1 yang menggambarkan riil ekonomi yang cenderung tidak miskin, skor 2 cenderung miskin, dan skor 3 sangat miskin.

Dengan rumus IRM sebagai berikut :

$$IRM = \frac{\sum_{i=1}^{11} S_i W_i}{100}$$

dimana:

IRM = indeks rumah tangga miskin.

Si = skor variabel ke-i.

Wi = penimbang setiap variabel (total penimbang = 100).

Metode skoring ini memberikan interval nilai 1-3 yang disebut sebagai Indeks Tingkat Kemiskinan yang artinya bahwa semakin tinggi nilai indeksnya semakin miskin kondisi rumah tangga bersangkutan. Orang yang tidak miskin mempunyai nilai indeks kecil atau mendekati 1 (satu).

Dalam rangka evaluasi antar wilayah, diperlukan indeks secara wilayah yang dapat dilakukan berjenjang dari Rukun Tetangga (RT), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Penghitungan indeks pada tingkat RT, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sudah harus menggunakan penimbang rumah tangga/ penduduk miskin dalam suatu wilayah satu tingkat dibawahnya.

Indeks RT diperoleh melalui rumus berikut :

$$IRT = \frac{\sum_{i=1}^N IRMi}{N}$$

dimana:

IRT = indeks Rukun Tetangga (RT).

IRMi = indeks rumah tangga miskin (IRM) ke-i.

i = 1, 2, 3, ..., N.

N = jumlah rumah tangga miskin di dalam RT.

## 2.6. Peta Penduduk Miskin Indonesia, 2000

Pemetaan penduduk miskin memberikan gambaran awal yang menyeluruh (*snapshot*) mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkat wilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu. Peta semacam ini adalah untuk mengetahui peta wilayah atau "kantong" penduduk miskin di Indonesia. Melalui peta ini penduduk miskin dapat diketahui, baik secara relatif (persentase penduduk miskin) maupun secara absolut (jumlah penduduk miskin).

Metode pemetaan penduduk miskin (*Metode PovMap*) pada dasarnya merupakan suatu metode yang menggunakan model regresi untuk memperkirakan pengeluaran rumah tangga dalam sensus berdasarkan data pengeluaran hasil survei. Hasil estimasi mengenai ukuran-ukuran kesejahteraan rumah tangga hasil sensus

kemudian diaggregasikan menjadi ukuran-ukuran kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat desa.

Metode PovMap diimplementasikan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap pembentukan model pengeluaran dan dekomposisi komponen residu (random). Dalam tahap ini penghitungan poverty mapping dimulai dengan melakukan estimasi fungsi pengeluaran. Dalam pemilihannya, variabel-variabel penjelas yang akan digunakan dalam model pengeluaran harus terdapat pada data sensus dan survei, variabel-variabel tersebut kemudian diuji dan didiagnostik melalui metode statistik untuk memperoleh variabel penjelas yang paling tepat menjelaskan fungsi konsumsi rumah tangga. Tahap kedua adalah tahap simulasi. Pada tahap ini proses simulasi melakukan beberapa tahap iterasi untuk memperoleh model yang paling tepat untuk menjelaskan konsumsi rumah tangga sensus.

Proses ini menggunakan paket program (*software package*) yang telah disiapkan oleh Qinghua Zhao dari DECRG World Bank (2002). Aplikasi *software* tersebut secara otomatis (dengan spesifikasi model yang memadai) menghasilkan indeks-indeks kemiskinan sampai pada level desa dengan masing-masing tingkat kecermatan kesalahan bakunya.

## **2.7. Pemetaan Kemiskinan Kecamatan di Indonesia, 2005**

Penghitungan penduduk miskin tahun 2005 tingkat kecamatan dilakukan dengan menggunakan gabungan data Susenas Kor tahun 2000-2005, sehingga kecukupan sampel untuk estimasi pada tingkat kecamatan terpenuhi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada Hukum Engel. Dasar dari Hukum Engel adalah semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan.

Langkah-langkah penghitungannya adalah seperti berikut ini:

- a. Mencari Garis Kemiskinan (GK) provinsi tahun 2002 dari Kor yang setara dengan GK provinsi dari Modul tahun 2002. Hal ini dilakukan oleh karena Susenas 2005 bukan merupakan modul konsumsi.
- b. Menghitung GK provinsi tahun 2005 dengan menggunakan GK provinsi tahun 2002 dari Kor yang disesuaikan dengan perubahan IHK pada provinsi selama Feb 2002-Feb 2005.

- c. Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi tahun 2005 berdasarkan GK provinsi tahun 2005 dengan menggunakan data Susenas Kor 2005.
- d. Jumlah dari penduduk miskin per provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin nasional yang dihitung dari panel Susenas Modul Konsumsi 2005.
- e. Menghitung rata-rata proporsi konsumsi makanan per provinsi (PMp) untuk penduduk miskin.
- f. Menghitung interval estimasi PMp dengan tingkat keyakinan 99 persen.
- g. Dari butir f, diperoleh batas atas interval estimasi koefisien Engel untuk provinsi ( $E_p$ ).
- h. Menghitung rasio proporsi konsumsi makanan kabupaten (PMk) terhadap PMp:  $RPM = PMk / PMp$ .
- i. Menghitung koefisien Engel untuk kabupaten/kota sebagai batas kemiskinan, yaitu:  $E_k = E_p * RPM$ .
- j. Berdasarkan butir i dilakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2005. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian, dimana apabila proporsi makanan di atas batas pada butir i, namun pengeluaran per kapitanya di atas batas atas interval garis kemiskinan pada tingkat keyakinan 99%, maka dikategorikan tidak miskin.
- k. Lakukan prorata jumlah/persentase penduduk miskin kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin provinsi (hasil pada butir d).
- l. Selanjutnya menghitung rata-rata proporsi pengeluaran makanan per kecamatan untuk penduduk miskin.
- m. Kemudian, dihitung koefisien Engel untuk kecamatan sebagai batas kemiskinan dengan cara yang sama pada saat menghitung koefisien Engel kabupaten.
- n. Hasilnya digunakan untuk melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin tingkat kecamatan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian, yaitu apabila proporsi makanan lebih besar dari pada batas namun pengeluaran per kapitanya di atas batas interval garis kemiskinan pada tingkat keyakinan 99%, maka dikategorikan tidak miskin.
- o. Dari persentase penduduk miskin yang diperoleh pada butir k, maka dihitung GK dari seluruh kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1).

## **2.8. Pendekatan Spesifik-Daerah dan Sayang Budaya di Sumba Timur**

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang secara sentralistik kurang memadai dan kurang realistis dalam memantau kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pada level atau di bawah level kabupaten/kota. Budaya lokal dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya hanya dipertimbangkan secara tidak langsung melalui penyeragaman pola konsumsi tingkat provinsi. Informasi-informasi yang dihasilkan tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu, alat pengukuran yang akurat, yang dapat merefleksikan hubungan sosial dan budaya dan yang menyebabkan kemiskinan pada level atau di bawah level kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan (Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya, Ritonga dan Betke 2002).

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis, yang dapat "diterjemahkan" ke dalam berbagai kebijakan yang perlu diambil dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Tinjauan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri perlu dilakukan. Indikator-indikator tersebut tentunya harus bersifat spesifik lokal dan sayang budaya. Salah satu model kesejahteraan yang komprehensif dan mampu mengidentifikasi tingkat kesejahteraan individu, rumah tangga atau keluarga, unit-unit sosial, dan wilayah komunitas adalah "Model Ketahanan Sosial" seperti dikembangkan Betke (2002).

## **2.9. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05)**

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala

rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian.
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring dimana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya

dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I = \sum W_i X_i RM$$

dimana:

$W_i$  = bobot variabel terpilih, dan  $\sum W_i = 1$

$X_i$  = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

IRM = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai IRM diatas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai IRM terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai IRM maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

<https://jabar.bps.go.id>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN, DAN DISTRIBUSI KETIMPANGAN PENGELUARAN**

#### **3.1. Metode Penghitungan Kemiskinan**

##### **a. Konsep:**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

##### **b. Sumber Data:**

Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

##### **c. Metode:**

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar

non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

#### **d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum P_{jkp} Q_{jkp} = \sum V_{jkp}$$

dimana:

$GKM_{jp}$  = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

$P_{jkp}$  = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

$Q_{jkp}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya  $GKM_j$  tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\frac{\sum V_{jkp}}{\sum K_{jkp}} = HK_{jp}$$

dimana:

$K_{jkp}$  = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

$HK_{jp}$  = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2100$$

dimana :

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum r_{kj} V_{kjp}$$

dimana :

GKNM<sub>jp</sub> = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V<sub>kjp</sub> = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r<sub>kj</sub> = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil

SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

dimana :

$\%PM_p$  = % Penduduk miskin di provinsi p.

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

$P_p$  = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum PM_p$$

dimana :

$PM_I$  = Penduduk miskin Indonesia.

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi p.

$n$  = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I}$$

dimana :

$\%PM_I$  = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

$P_I$  = Jumlah penduduk Indonesia.

### 3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

□ Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh Head Count Index (P0), jika  $\alpha=1$  diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika  $\alpha=2$  disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).

### 3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan/Pengeluaran

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas.

#### a. Koefisien Gini (Gini Rasio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

dimana:

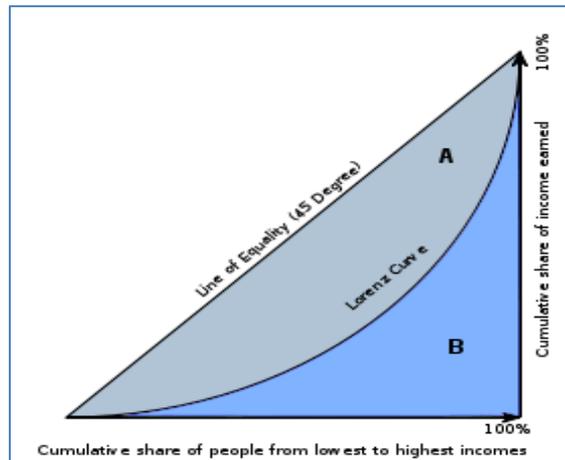
KG = Koefisien Gini

$P_i$  = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan  $i$

$Y_i$  = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita  $i$

$n$  = Jumlah observasi

**Gambar 3.1 Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz**



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.

- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:
- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi  
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik  
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.



## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat, 2016-2018

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dan Indonesia pada periode 2016-2018 terlihat adanya kecenderungan menurun baik Jawa Barat maupun Indonesia. Pada periode tersebut tingkat kemiskinan di Jawa Barat lebih rendah baik di pedesaan maupun diperkotaan. Bahkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2018 jauh lebih rendah yaitu hanya 7,45 persen sementara Indonesia masih 9,82 persen.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Di Pulau Jawa dan Indonesia, Menurut Daerah Kondisi Maret Tahun 2016 dan Maret 2018

Daerah	Maret 2016			Maret 2018		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	3,75	-	3,75	3,57	-	3,57
Jawa Barat	7,67	11,80	8,95	6,47	10,25	7,45
Jawa Tengah	11,44	14,89	13,27	9,73	12,99	11,32
D.I. Yogyakarta	11,79	16,63	13,34	11,03	15,12	12,13
Jawa Timur	7,94	16,01	12,05	7,06	15,30	10,98
Banten	4,51	7,45	5,42	4,38	7,33	5,24
Indonesia	7,79	14,11	10,86	7,02	13,20	9,82

Sumber: BPS, Penghitungan dan Analisa Kemiskinan Makro Indonesia 2018

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari pada Indonesia. Pada kondisi Maret 2016, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat hanya 8,95 persen sedangkan Indonesia 10,86 persen. Pada kondisi Maret 2018, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat turun menjadi 7,45 persen (turun sebesar 1,50 poin), sedangkan persentase

penduduk miskin Indonesia turun menjadi 9,82 persen (turun sebesar 1,04 persen). Persentase penduduk miskin provinsi Jawa Barat bukan hanya lebih rendah dari Indonesia tetapi penurunan penduduk miskinnya juga lebih cepat dari Indonesia.

Menurut provinsi di Pulau Jawa, tampak bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari Provinsi lainnya, kecuali DKI Jakarta dan Banten. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada periode 2016 dan 2018, tingkat penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Barat (0,49 persen poin) juga lebih cepat jika dibanding DKI Jakarta (0,18 persen), Jawa Timur (1,07 persen poin) dan Banten (0,18 persen poin).

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Menurut Daerah, Kondisi Maret Tahun 2016 dan 2018

Daerah	Maret 2016 (Dalam Ribuan)			Maret 2018 (Dalam Ribuan)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jawa Barat	2.497,59	1.726,73	4.224,32	2.327,87	1.287,92	3.615,79
Indonesia	10.507,20	17.772,83	28.280,03	10 144,37	15 805,43	25 949,80

Sumber: BPS, Penghitungan dan Analisa Kemiskinan Makro Indonesia 2018

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada periode 2016 dan 2018, jumlah penduduk miskin Jawa Barat menurun sebesar 608,53 ribu orang dari 4.224,32 ribu pada tahun 2016 menjadi 3.615,79 ribu pada tahun 2018. Pada periode 2016 dan 2018, jumlah penduduk miskin di perdesan menurunnya lebih tinggi yaitu sebesar 438,81 ribu dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 169,72 ribu.

#### **4.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat, Maret 2016 dan Maret 2018**

Analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi Maret 2016 dan Maret 2018 dimaksudkan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan selama 2 (dua) tahun terakhir. Tabel 4.3. menunjukkan Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat Maret

2016 sebesar 4.224.325 (8,95 persen) dan pada Maret 2018 turun menjadi 3.615,790 (7,45 persen).

Tabel 4.3  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah, Maret 2016 dan Maret 2018

Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2016	228.191	96.286	325.017	2.497.592	7,67
Maret 2018	263.583	105.097	368.680	2.327.890	6,47
Perdesaan					
Maret 2016	246.605	78.332	324.937	1.726.733	11,80
Maret 2018	274.016	90.136	364.151	1.287.920	10,25
Perkotaan+Desa					
Maret 2016	234.108	90.884	324.992	4.224.325	8,95
Maret 2018	266.531	101.223	367.755	3.615.790	7,45

Sumber: Susenas 2016 dan 2018

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 1,55 persen poin (11,80 persen menjadi 10,25 persen) sedangkan di daerah perkotaan turun 1,20 persen poin (dari 7,67 persen menjadi 6,47 persen). Secara absolut selama periode Maret 2016- Maret 2018, penduduk miskin di perdesaan berkurang 439,81 ribu orang (dari 1.726,73 ribu orang menjadi 1.287,92 ribu orang), sementara di perkotaan berkurang sebanyak 69,3 ribu orang (dari 2.497,59 ribu orang menjadi 2.327,87 ribu orang).

Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan pada bulan Maret 2018 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 35,62 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2016 (40,88 persen). Sebaliknya persentase penduduk miskin perkotaan terhadap penduduk miskin meningkat dari 59,12 persen menjadi 64,31 persen.

### **4.3. Garis Kemiskinan di Jawa Barat, Maret 2016 dan Maret 2018**

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK). Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2016-Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 13,16 persen yaitu dari Rp 324.992 pada Maret 2016 menjadi Rp 367.755 pada Maret 2018. Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari GK Daerah Perkotaan dan Perdesaan, terlihat bahwa GK Perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 13,43 persen dari Rp 325.017 pada Maret 2016 menjadi Rp 368.680 pada Maret 2018. Sedangkan kenaikan GK perdesaan lebih rendah dibanding kenaikan di perkotaan yaitu sebesar 12,07 persen dari Rp 324.937 menjadi Rp 364.151.

Pada Maret 2018, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 266.531,- sedangkan jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp 274.016,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp 263.583,-). Tetapi sebaliknya untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan yaitu Rp 105.097 berbanding Rp 90.136,- Garis kemiskinan non Makanan secara total sebesar Rp 101.223,-.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih dominan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dibanding non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap garis kemiskinan (GK) sebesar 71,49 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,25 persen. Secara total, peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,48 persen.

Tabel 4.4.  
Garis Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia, Tahun 2016 dan 2018

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)			
	Maret 2016		Maret 2018	
	K	D	K	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	510.359	-	593.108	-
Jawa Barat	325.017	324.937	368.680	364.151
Jawa Tengah	315.269	319.188	353.240	348.206
D.I. Yogyakarta	364.786	331.308	426.580	366.256
Jawa Timur	319.662	323.799	385.009	361.493
Banten	377.052	347.765	448.518	390.309
Indonesia	364.527	343.647	415.614	383.958

Sumber: BPS, Penghitungan dan Analisa Kemiskinan Makro Indonesia 2018

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari pada Indonesia. Dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa tampak bahwa garis kemiskinan Jawa Barat lebih rendah dari DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten, tetapi masih lebih tinggi garis kemiskinannya jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dari garis kemiskinan di perdesaan.

Tabel 4.5 menunjukkan kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi di Pulau Jawa. Tampak bahwa KHL Jawa Barat pada tahun 2013 lebih rendah di banding DKI Jakarta dan Banten, lebih tinggi dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta. Pada periode 2013-2018, Polanya sama dimana KHL Jawa Barat selalu lebih rendah di banding DKI Jakarta dan Banten, tetapi lebih tinggi dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta. Pola KHL tersebut hampir sama dengan pola garis kemiskinan.

Tabel 4.5. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Tahun 2013-2018

Provinsi	Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Rupiah					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	1.978.789	2.299.860	2.538.174	3.100.000	3.355.750	3.648.035
Jawa Barat	946.689	946.689	946.689	1.312.355	1.420.624	1.544.360
Jawa Tengah	857.728	857.728	857.728	1.265.000	1.367.000.	1.486.065
D.I. Yogyakarta	924.284	924.284	924.284	1.237.700	1.337.645.	1.454.154
Jawa Timur	825.000	825.000	825.000	1.273.490	1.388.000.	1.508.854
Banten	1.170.000	1.325.000	1.403.556	1.784.000	1.931.180	2.099.385

Sumber: Website BPS dan Kemenakertrans

#### **4.4. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Jawa Barat, Maret 2016- Maret 2018**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 1,489 pada keadaan Maret 2016 menjadi 1,377 pada keadaan Maret 2018. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan dari 0,372 pada keadaan Maret 2016 menjadi 0,335 pada keadaan Maret 2018.

Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati dari garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga cenderung menyempit. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan yang terjadi di perdesaan untuk kedua indikator tersebut.

Tabel 4.6  
 Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah, Maret 2016 dan Maret 2018

Daerah	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Desa		
	P0	P1	P2	P0	P1	P2	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Maret 2016	7,67	1,171	0,259	11,80	2,197	0,624	8,95	1,489	0,372
Maret 2018	6,47	1,133	0,285	10,25	1,841	0,477	7,45	1,317	0,335
Perubahan	1,20	0,038	-0,030	1,55	0,356	0,157	1,50	0,172	0,040

Sumber: Susenas 2016 dan 2018

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan masing-masing 1,841 dan 1,133. Tingkat penurunannya di perdesaan juga lebih cepat dibandingkan perkotaan masing-masing 0,356 poin dan 0,038 poin. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan di perkotaan.

#### 4.5. Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018

Tabel 4.7 menyajikan informasi mengenai kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pada kondisi 2018. Garis kemiskinan tertinggi untuk kabupaten/kota ada di Kota Depok yaitu 615.255 rupiah, yang diikuti oleh Kota Bekasi sebesar 582.723 rupiah. Sementara garis kemiskinan terendah tercatat di Kabupaten Garut yaitu sebesar 282.683, yang diikuti oleh Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar 302.213 rupiah.

Secara umum tampak bahwa garis kemiskinan tertinggi secara rata-rata masih ditempati oleh Kota Depok dan Kota Bekasi. Hal ini bisa dipahami mengingat ke dua kota tersebut berbatasan langsung dengan kota metropolitan Jakarta yang memiliki konsentrasi pusat bisnis dan pemerintahan di Indonesia.

Tabel 4.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2018				
		Penduduk miskin (000)	%	Garis Kemiskinan	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bogor	415.02	7.14	359 787	1.12	0,26
2.	Sukabumi	166.33	6.76	302 213	0.86	0,19
3.	Cianjur	221.58	9.81	340 882	1.34	0,27
4.	Bandung	246.13	6.65	334 929	0.87	0,20
5.	Garut	241.31	9.27	282 683	1.49	0,37
6.	Tasikmalaya	172.41	9.85	306 759	1.19	0,23
7.	Ciamis	85.72	7.22	357 382	1.18	0,26
8.	Kuningan	131.16	12.22	332 483	1.73	0,40
9.	Cirebon	232.37	10.70	370 747	2.04	0,55
10.	Majalengka	129.29	10.79	440 776	1.96	0,51
11.	Sumedang	112.14	9.76	334 743	1.72	0,47
12.	Indramayu	204.18	11.89	447 378	2.23	0,60
13.	Subang	136.61	8.67	331 557	1.70	0,51
14.	Purwakarta	75.94	7.99	352 061	0.87	0,16
15.	Karawang	187.96	8.06	433 972	1.21	0,30
16.	Bekasi	157.21	4.37	463 507	0.65	0,15
17.	Bandung Barat	169.00	10.06	329 415	1.45	0,35
18.	Pangandaran	32.19	8.12	360 960	1.24	0,30
19.	Kota Bogor	64.85	5.93	480 749	0.77	0,17
20.	Kota Sukabumi	23.20	7.12	497 995	1.09	0,26
21.	Kota Bandung	89.38	3.57	448 902	0.48	0,11
22.	Kota Cirebon	28.03	8.88	426 738	0.99	0,19
23.	Kota Bekasi	119.82	4.11	582 723	0.72	0,18
24.	Kota Depok	49.39	2.14	615 255	0.31	0,06
25.	Kota Cimahi	29.94	4.94	462 969	0.84	0,23
26.	Kota Tasikmalaya	84.22	12.71	447 008	1.52	0,31
27.	Kota Banjar	10.41	5.70	324 958	0.79	0,19
Jawa Barat		3615.29	7.45	344 427	1.32	0.33

Sumber: BPS, Susenas 2018

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap kabupaten/kota maka jumlah dan persentase penduduk miskin di tiap kabupaten/kota dapat dihitung. Tabel 4.7 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota pada kondisi 2018. Dari angka kemiskinan tahun 2018 antar kabupaten/kota terlihat bahwa hanya ada 6 (enam) kabupaten/kota yang masih di atas 10 persen penduduk miskinnya yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Sementara 21 kabupaten/kota lainnya sudah di bawah 10 persen.

Untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) terdapat 17 kabupaten/kota yang indeksinya lebih rendah dari Jawa Barat, dan masih ada 10 kabupaten yang indeks kedalaman kemiskinannya masih di atas Jawa Barat. Sementara untuk indeks keparahan kemiskinan (P2), sudah 19 kabupaten/kota yang indeksinya di bawah Jawa Barat, tetapi masih ada 8 kabupaten yang lebih tinggi dari Jawa Barat.

#### 4.6. Distribusi Ketimpangan Berdasarkan Koefisien Gini

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa selama periode 2013-2018, secara umum terjadi penurunan angka Gini Rasio di Indonesia dari 0,410 pada tahun 2013 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Pola yang sama terjadi di semua provinsi di Pulau Jawa, kecuali Banten. Provinsi Jawa Barat, Gini rasionya menurun dari 0,415 pada tahun 2015 menjadi 0,407 pada tahun 2018.

Tabel 4.8. Gini Rasio Provinsi di Pulau Jawa dan Indonesia, 2010-2018

Provinsi	Gini Rasio					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	0.430	0.420	0.431	0.411	0.413	0.394
Jawa Barat	0.410	0.410	0.415	0.413	0.403	0.407
Jawa Tengah	0.390	0.380	0.382	0.366	0.365	0.378
D.I. Yogyakarta	0.440	0.430	0.433	0.420	0.432	0.441
Jawa Timur	0.360	0.360	0.415	0.402	0.396	0.379
Banten	0.400	0.390	0.401	0.394	0.382	0.385
Indonesia	0.410	0.410	0.408	0.397	0.393	0.389

Sumber: Website BPS

Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada tahun 2013, terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk di seluruh Indonesia dengan Gini Ratio 0,410, sedangkan pada periode 2013-2018 distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin baik dengan gini rasio 0,389 pada tahun 2018. Berdasarkan koefisien gini, kesenjangan pengeluaran di Provinsi Jawa Barat secara umum termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan indeks gini 0,407 .

<https://jabar.bps.go.id>

## **BAB V PENUTUP**

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dan Indonesia pada periode 2016-2018 terlihat adanya kecenderungan menurun. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 8,95 persen pada tahun 2016 menjadi 7,45 persen pada tahun 2018. Sementara Indonesia, penduduk miskinnya menurun dari 10,86 persen pada tahun 2016 menjadi 9,82 persen pada tahun 2018. Sehingga tingkat kemiskinan di Jawa Barat lebih rendah dari Indonesia. Bahkan Persentase penduduk miskin provinsi Jawa Barat bukan hanya lebih rendah dari Indonesia tetapi penurunan penduduk miskinnya juga lebih cepat dari Indonesia.

Pada periode 2016-2018, jumlah penduduk miskin Jawa Barat menurun sebesar 608,53 ribu orang dari 4.224,32 ribu pada tahun 2016 menjadi 3.615,79 ribu pada tahun 2018. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perdesaan menurunnya lebih tinggi yaitu sebesar 439,81 ribu orang dibandingkan di daerah perkotaan sebesar 69,32 ribu orang. Tetapi persentase penduduk miskin di perkotaan relatif lebih rendah jika dibandingkan di daerah perdesaan. Pada tahun 2018, penduduk miskin di perkotaan hanya 6,47 persen, sementara di perdesaan sebesar 10,25 persen.

Angka kemiskinan tahun 2018 antar kabupaten/kota terlihat bahwa hanya ada 6 (enam) kabupaten/kota yang masih di atas 10 persen penduduk miskinnya yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Sementara 21 kabupaten/kota lainnya sudah di bawah 10 persen.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 1,489 pada keadaan Maret 2016 menjadi 1,377 pada keadaan Maret 2018. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan dari 0,372 pada keadaan Maret 2016 menjadi 0,335 pada keadaan Maret 2018. Penurunan nilai kedua indeks ini

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan masing-masing 1,841 dan 1,133. Tingkat penurunannya di perdesaan juga lebih cepat dibandingkan perkotaan masing-masing 0,356 poin dan 0,038 poin. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan di perkotaan.

Untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) terdapat 17 kabupaten/kota yang indeksinya lebih rendah dari Jawa Barat, dan masih ada 10 kabupaten yang indeks kedalaman kemiskinannya masih di atas Jawa Barat. Sementara untuk indeks keparahan kemiskinan (P2), sudah 19 kabupaten/kota yang indeksinya di bawah Jawa Barat, tetapi masih ada 8 kabupaten yang lebih tinggi dari Jawa Barat.

Berdasarkan koefisien gini, kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat secara umum termasuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan indeks gini 0,407. Indeks ini lebih besar dari nasional yang hanya 0,389 pada tahun 2018.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2003, Metodologi dan Profil Kemiskinan Tahun 2002, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2006, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000a, Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999 : Metode BPS. Seri Publikasi Susenas Mini 1999-Buku 1, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000b, Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Sebuah kajian sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000c, Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000d, Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin : Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin 2000, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001, Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil SP 2000, Pedoman Materi Teknis, Laporan tidak dipublikasi, Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001a, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Timur 2000, Waingapu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001b, Karakteristik Penduduk Sumba Timur Hasil Sensus Penduduk 2000, Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001c, Pendataan Rumah tangga Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Banjarmasin : BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001d, Pendataan Rumah tangga Miskin Jawa Timur (Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001e, Pendataan Rumah tangga Miskin di DKI Jakarta (Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Jakarta : BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2002, Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan, Jakarta : Badan Pusat Statistik. Center for Economic and Social Studies (CESS), 2003, Program Anti Kemiskinan di Indonesia : Pemetaan Informasi dan Kegiatan, Jakarta : Penerbit Center for Economic and Social Studies (CESS).
- Bagong, Suyanto, 1995, Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya, Surabaya : Airlangga University Press.
- Betke, Friedhelm, 2001, The "Family-in-Focus" Approach: Developing Policy Oriented Monitoring and Analysis of Human Development in Indonesia, Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Betke, Friedhelm, 2002, Assesing Social Resielence Among Regencies and Communities in Indonesia. Makalah untuk Diskusi Statistik Ketahanan Sosial di BPS. Jakarta: BPS
- BPS, Bappenas dan UNDP, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP.
- Haughton, Jonathon, 2001, The Impact of the East Asian Crisis : Poverty Analysis Using Panel Data, Lecture notes prepared for the World Bank, Boston : Suffolk University and Beacon Hill Institute.
- Heryanah. M, SE, 2016, Kesenjangan Pendapatan Kota Sukabumi dan Data Susenas, Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, Lomba Karya Tulis Dalam Rangka Hari Statistik 2016.
- Ravallion, Martin, 1998, Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study, World Bank : Working Paper No. 13.
- Ritonga, Hamonangan dan Betke, Friedhelm, 2002, Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat Yang Spesifik Daerah Dan Sayang Budaya, Jakarta : BPS.
- Suseno Triyanto Widodo, 1990, Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Thee Kian Wie, 1981, Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan, Jakarta : Sinar Harapan.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No.43 Bandung 40124, Jawa Barat Telp:

022 7272595, 7201696 Fax: 022 7213572 Email:

[bps3200@bps.go.id](mailto:bps3200@bps.go.id)

Website: <http://jabar.bps.go.id>